

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistematika isi catatan atas laporan keuangan ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN TAMBAHAN

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah yang mengacu pada sektor riil dengan skala prioritas bidang pertanian dan pertumbuhan UMKM dengan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai dan ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan efektif dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan Visi lima tahun mendatang yaitu :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Agar visi dapat diwujudkan maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Jateng telah dilakukan pembangunan guna :

1. Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan

sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

2. Pengurangan Pengangguran

Penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya local termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

3. Pembangunan Infrastruktur

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob, pembangunan pelabuhan, bandar udara, transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan *soft power* melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan *Public Private Partnership* (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

4. Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan di Jawa Tengah diwujudkan melalui empat pilar, yaitu : 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan

pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.

5. Kedaulatan Energi

Upaya penanganan isu strategis kedaulatan energi ini bukan merupakan upaya jangka pendek maupun menengah, tetapi merupakan upaya jangka panjang yang harus dirintis sejak saat ini, sebelum ketergantungan terhadap energi fosil semakin tak terkendali. Upaya kunci yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan energi alternatif berbasis gas, sumberdaya energi baru terbarukan, maupun bahan bakar nabati, yang dikelola secara mandiri di level lokal, sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, daerah perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah-langkah konkrit utamanya terkait pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum *rembug*. Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, maka kebijakan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pembelanjaan keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang mendesak (*urgent*), penting (*important*), menjadi penghela (*prime mover*), serta pengungkit (*leverage*). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan

serta penentuan sasaran pembelanjaan.

Penetapan arah belanja daerah : belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini dapat dikelompokkan kedalam belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus mempertimbangkan asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Pencapaian Target Kinerja APBD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap.

Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1.1. ASET

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0

5.1.1.1.1.2. Piutang

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Piutang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0

5.1.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. **15.827.100,-**

No.	Barang	Jumlah Satuan		Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Buku Agenda besar	22	buku	15.000	330.000
2	Buku Agenda kecil	30	buku	11.200	336.000
3	Buku Ekspedisi	34	buku	10.000	340.000
4	Amplop panjang	28	dos	12.700	355.600
5	Amplop sedang	31	dos	11.500	356.500
6	Batu Alkalin A3	15	set	11.300	169.500
7	Batu ABC kecil	32	buah	3.000	96.000
8	Batu Kotak	18	buah	9.000	162.000
9	Bolpoint	2	buah	7.500	15.000
10	Pembolong sedang	38	buah	35.000	1.330.000
11	Pembolong kecil	22	buah	15.000	330.000

12	Pita mesin ketik	18	buah	20.400	367.200
13	Clip besar	9	dos	5.000	45.000
14	Penjepit besar	48	buah	3.500	168.000
15	Klip kecil	121	dos	2.100	254.100
16	Jepitan paling kecil	696	buah	650	452.400
17	Steples kecil	67	buah	16.000	1.072.000
18	Steples besar	13	buah	50.500	656.500
19	Gunting	12	buah	10.500	126.000
20	Cuter	15	buah	10.700	160.500
21	Stabilo	3	dos	55.000	165.000
22	Spidol hitam besar	4	dos	70.000	280.000
23	Lakban kecil	18	buah	7.500	135.000
24	Lakban besar	3	buah	12.000	36.000
25	Isi steples besar	9	dos	4.600	41.400
26	Lem	10	botol	3.000	30.000
27	Isi steples kecil	125	dos	3.000	375.000
28	CD RW	37	buah	10.000	370.000
29	DVD R	26	buah	10.000	260.000
30	Kertas cover isi 50	1	pack	180.000	180.000
31	Spidol Kecil Hitam	23	buah	3.000	69.000
32	Spidol Kecil Warna	12	buah	3.000	36.000
33	HVS	12	rim	40.500	486.000
34	Kwarto	8	rim	38.500	308.000
35	Kwitansi	34	buah	10.000	340.000
36	Tinta warna	3	dos	250.000	750.000
37	Tinta hitam	2	dos	200.000	400.000
38	Setip	21	dos	2.300	48.300
39	Map gantung	78	buah	4.000	312.000
40	Odner	1	buah	21.000	21.000
41	Karbon folio	9	pack	34.700	312.300
42	Karbon double folio	6	pack	80.000	480.000
43	Plastik Transparan	2	pack	40.000	80.000
44	Kertas Double Folio	5	rim	74.500	372.500
45	Lem cair	10	buah	4.500	45.000
46	Penggaris	11	buah	3.000	33.000
47	Pencil 2B	7	buah	3.500	24.500
48	Spidol Transparan 4 warna	4	buah	40.000	160.000
49	Bantalan Stempel	9	buah	12.500	112.500
50	Tinta Stempel	13	buah	2.200	28.600
51	Tip ex	17	buah	12.500	212.500
52	Bolpoint Boliner	9	buah	20.000	180.000
53	Kertas HVS kuning	3	rim	50.000	150.000
54	Batu ABC Besar	12	buah	5.000	60.000
55	Plakban sedang	15	buah	12.000	180.000
56	Bolpoint Merah	3	buah	7.500	22.500
57	Kertas cover merah	1	pack	180.000	180.000

58	Solatip Bening	4	buah	10.000	40.000
59	Pencil Merah	12	biji	3.500	42.000
60	Snelhecter	137	biji	1.100	150.700
61	Tinta laser	3	buah	300.000	900.000
62	Kertas dourslah pink	2	rim	40.000	80.000
63	Kapur barus	3	kg	50.000	150.000
64	Batu Alkalin A2	6	set	11.000	66.000
	JUMLAH				15.827.100

5.1.1.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar **Rp 18.886.129.515,50** dengan perincian sebagai berikut :

Aset Tetap

No	Uraian	2015	2014
1	2	3	4
	ASET TETAP	28.220.435.562	25.854.682.962
1	Tanah	11.786.143.000	11.786.143.000
2	Peralatan dan Mesin	10.574.941.287	8.257.391.287
	Alat-alat besar	640.150.000	-
	Alat-alat angkut darat bermotor	3.544.643.464	3.002.013.464
	Alat-alat bengkel	85.700.000	85.700.000
	Peralatan kantor dan rumah tangga	4.445.462.823	3.701.672.823
	Alat-alat studio dan alat komunikasi	1.858.984.996	1.468.005.000
3	Gedung dan Bangunan	5.665.311.875	5.620.602.875
	Bangunan	5.563.661.875	5.518.952.875
	Monumen	101.650.000	101.650.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.870.000	111.870.000
	Instalasi listrik jaringan	111.870.000	111.870.000
5	Aset Tetap Lainnya	82.169.400	78.675.800

	Buku/kepustakaan	80.619.400	77.125.800
	Barang bercorak kesenian	1.550.000	1.550.000
6	Akumulasi Penyusutan	(9.334.306.046,50)	(8.576.537.434,33)
7	Aset Lainnya	39.700.000	39.700.000
8	Barang Ekstrakompitabel	(207.859.000)	
	Jumlah	18.886.129.515,50	17.278.145.527,67

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Penambahan	2015
Belanja Modal	2.573.611.596
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi	684.859.000
Koreksi	-
Penilaian	-
Jumlah	3.258.470.600

Pengurangan	2015
Penghapusan	-
Ekstrakontable	207.859.000
Reklasifikasi	684.859.000
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	892.718.000

Akumulasi Penyusutan :

Akumulasi Penyusutan	2015
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.334.306.046,50)

1.1.1.3.1 Tanah

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	11.786.143.000	11.786.143.000
	Jumlah	11.786.143.000	11.786.143.000

Aset Tanah Sebesar **Rp. 11.786.143.000** di Tahun Anggaran 2015 tidak ada penambahan maupun pengurangan.

1.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	Alat-alat berat	640.150.000	-
2	Alat-alat angkut darat bermotor	3.544.643.464	3.002.013.464
3	Alat-alat bengkel dan Alat ukur	85.700.000	85.700.000
4	Peralatan kantor dan rumah tangga	4.445.462.823	3.701.672.823
5	Alat-alat studio dan alat komunikasi	1.858.985.000	1.468.005.000
	Jumlah	10.574.941.287	8.257.391.287

Alat-alat Berat

Alat-alat Berat Sebesar **Rp 640.150.000** di Tahun Anggaran 2015 ada penambahan Rp. 640.150.000, dengan rincian (terlampir).

Alat-alat Angkut Darat dan Bermotor

Alat-alat angkut darat bermotor Sebesar **Rp 3.544.643.464** di Tahun Anggaran 2015 ada penambahan **Rp. 542.630.000**, dengan rincian (terlampir).

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Bahwa Alat-alat Bengkel dan Alat ukur sebesar Rp. **85.700.000** di Tahun Anggaran 2015 tidak ada penambahan maupun penghapusan.

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Bahwa Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar **Rp. 3.544.643.464** di Tahun Anggaran 2015 ada penambahan **Rp. 1.589.819.000** dan terdapat Reklas ke aset tetap **Rp. 640.150.000** dan barang ektracomtable sebesar **Rp. 205.879.000** dengan rincian (terlampir).

Alat-alat Studio dan Komunikasi

Bahwa Alat-alat studio dan komunikasi sebesar **Rp. 1.858.985.000** di Tahun Anggaran 2015 terdapat penambahan sebesar **Rp. 392.960.000**, dengan rincian (terlampir).

1.1.1.3.3. Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2015	2014
1	Gedung	5563661875	5.518.952.875
2	Monumen	101.650.000	101.650.000
	Jumlah	5.665.311.875	5.620.602.875

Gedung

Aset Bangunan Gedung Sebesar **Rp. 5.665.311.875** di Tahun Anggaran 2015 terdapat penambahan sebesar **Rp. 44.709.000**, dengan rincian (terlampir).

Monumen

Bahwa Monumen Sebesar Rp. **101.650.000** di Tahun Anggaran 2015 tidak ada penambahan maupun penghapusan.

1.1.1.3.4. Jalan,Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2015	2014
1	Jaringan	111.870.000	111.870.000
	Jumlah	111.870.000	111.870.000

Instalansi Listrik Jaringan

Untuk Instalansi Listrik Jaringan Sebesar **Rp. 111.870.000** di Tahun Anggaran 2015 tidak ada penambahan maupun penghapusan.

5.1.1.1.4. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2015	2014
1	Buku Perpustakaan	80.619.400	70.535.800
2	Barang Bercorak Seni dan Budaya	1.550.000	1.550.000
	Jumlah	82.169.400	72.085.800

Buku Perpustakaan

Untuk Buku Perpustakaan sebesar Rp. **80.619.400** telah dilaksanakan penambahan Aset sebesar Rp. **3.493.600**. Berita Acara Serah Terima barang dengan No. 027/7716 tanggal 24 Desember 2014 sebanyak 76 buku dengan rincian : (terlampir).

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Untuk Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan sebesar Rp. **1.550.000** di tahun anggaran 2014 tidak ada penambahan maupun penghapusan.

5.1.1.1.5 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan penyusutan aset dalam Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015. Penerapan penyusutan akun Aset Tetap

berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jembatan. Kebijakan ini mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akruak dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban anggaran sampai dengan tahun anggaran 2015. Kebijakan Penyusutan dijelaskan pada Bab V. Akumulasi Penyusutan yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp **9.334.306.046,50**

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Tanah	11.786.143.000	-	-
2	Alat-alat besar	640.150.000	80.018.750	560.131.250
3	Alat Angkutan	3.544.643.464	2.541.065.706	1.003.577.758
4	Alat Bengkel	85.700.000	85.700.000	0
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.445.462.823	3.601.618.423	843.844.400
6	Alat Studio dan Komunikasi	1.858.985.000	1.536.041.000	322.944.000
7	Gedung dan Monumen	5.665.311.875	1.452.617.167,50	4.135.443.707,50
8	Instalasi	111.870.000	37.248.000	74.622.000
9	Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak	82.169.400	-	-
	Jumlah	28.220.435.562	9.334.306.046,50	7.017.817.115,50

5.1.1.3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan Ekuitas Dana Dicadangkan dan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.

Rincian Ekuitas Dana Sebagai Berikut :

No	Uraian	2015	2014
	Ekuitas Dana Lancar	15.827.100	14.490.600
1	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	15.827.100	14.490.600
2	Cadangan Piutang	-	-
3	Cadangan Persediaan	15.827.100	14.490.600
	Ekuitas Dana Investasi	18.925.829.515,50	17.317.845.527,67
1	Diinvestasikan dalam investasi jangka pjg	-	-

2	Diinvestasikan dalam asset tetap	18.925.829.515,50	17.278.145.527,67
3	Diinvestasikan dalam asset lainnya	39.700.000	39.700.000
	Ekuitas Dana Cadangan	-	-
1	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-
	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	13.292.816,67	12.478.620,83
1	Ekuitas Beban dibayar dimuka	13.292.816,67	12.478.620,83
2	Ekuitas Pendapatan dibayar dimuka	-	-
3	Ekuitas Perubahan SAL	-	-
4	RK PPKD	-	-

5.1.2.1. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari penerimaan lain-lain selama periode ini adalah sebesar Rp. **0**.

5.1.2.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Biro Keuangan.

Realisasi Belanja per Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2015	Tahun 2014
Belanja Tidak Langsung	14.384.003.293	11.265.631.685
Belanja Pegawai	14.384.003.293	11.265.631.685
Belanja Langsung	39.747.823.344	39.393.269.235
Belanja pegawai	6.965.071.000	10.479.020.000
Honorarium PNS	217.875.000	617.535.000
Honorarium Non PNS	6.747.196.000	9.861.485.000
Uang Lembur	-	-
Belanja Barang dan Jasa	32.782.752.344	27.987.192.235
Belanja bahan pakai habis	2.616.757.900	2.117.744.975
Belanja bahan/material	45.655.000	58.555.000
Belanja jasa kantor	4.887.832.175	4.003.294.220

Belanja premi asuransi	85.702.060	74.871.725
Belanja perawatan kendaraan bermotor	640.499.050	685.239.500
Belanja cetak dan penggandaan	1.536.080.600	1.089.223.227
Belanja sewa rumah/gedung/parkir	3.188.178.000	2.322.067.000
Belanja sewa sarana mobilitas	100.700.000	113.500.000
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	22.200.000	21.000.000
Belanja makanan dan minuman	5.985.676.800	5.140.866.800
Belanja pakaian dinas dan atributnya	260.717.000	69.459.250
Belanja pakaian kerja	1.772.831.000	1.991.496.000
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	35.871.500
Belanja perjalanan dinas	7.406.268.671	9.101.239.278
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.650.000	34.400.000
Belanja pemeliharaan	1.424.425.488	1.096.863.760
Belanja Konsultasi	154.495.000	-
Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hadiah Uang)	53.500.000	31.500.000
Belanja modal	2.573.611.600	927.057.000
Belanja modal pengadaan Alat-alat Angkt darat	542.630.000	496.292.000
Belanja modal pengadaan alat-alat besar darat	640.150.000	-
Belanja modal Pengadaan alat-alat rumah tangga	374.559.000	
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor		18.750.000
Belanja modal pengadaan komputer	254.900.000	189.250.000
Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat	321.330.000	
Belanja modal pengadaan mebeulair		216.175.000
Belanja modal pengadaan Alat-alat studio	395.000.000	-
Belanja modal pengadaan Bangunan gedung tempat kerja	44.800.000	-
Belanja modal pengadaan Alat-alat komunikasi	-	-
Belanja modal pengadaan buku	3.493.600	6.590.000
Belanja modal pengadaan tanah	-	-

5.1.2.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, LO, beban dan surplus/defisit operasional

dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng 31 Desember 2015

No	Uraian	2015
	Pendapatan	
1	Jumlah Pendapatan	-
	Beban	
	Beban Operasional	
1	Beban Pegawai	21.349.074.293,00
2	Beban Persediaan	12.209.353.800,00
3	Beban Jasa	8.440.293.039,16
4	Beban Pemeliharaan	2.064.924.538,00
5	Beban Perjalanan Dinas	7.406.268.671,00
6	Beban Penyusutan	765.708.612,17
7	Beban Penyisihan Piutang	
8	Beban Diragukan Tertagih Invsatsi Non Permanen	
9	Beban Hibah Aset	
10	Beban Penghapusan Aset	
11	Beban Lain-lain	86.150.000,00
	Jumlah Beban Operasional	52.321.772.953,33
	Beban Transfer	-
	JUMLAH BEBAN	52.321.772.953,33
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(52.321.772.953,33)

5.1.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	EKUITAS AWAL	17.344.814.748,50	21.528.581.549,00
2	SURPLUS/DEFISITLO	(52.321.772.953,33)	(50.134.070.031,33)
	SURPLUS/DEFISIT LO	(52.321.772.953,33)	(50.134.070.031,33)
	RK PPKD	54.131.826.637,00	50.658.900.920,00
	KAS BENDAHARA	-	-
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(215.799.000,00)	(4.708.597.689,17)
	KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG		
	KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG TIDAK TERTAGIH		

	KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN		
	KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN		
	KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP	(207.859.000,00)	(39.700.000,00)
	KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP		(4.708.597.689,17)
	KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA		39.700.000,00
	KOREKSI/PENYESUAIAN AMORTISASI	(7.940.000,00)	
4	EKUITAS AKHIR	18.939.069.432,17	17.344.814.748,50

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Domisili tempat satuan kerja tersebut berada di Jalan A. Yani No. 160 Semarang.

BAB VII PENUTUP

Lampiran Tambahan